

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Populasi/Sampel Penelitian

Lokasi penelitian Disertasi ini dilakukan di wilayah Kabupaten Bandung. Penulis memilih Kabupaten Bandung sebagai lokasi penelitian dikarenakan wilayah ini memiliki kekhasan dalam aspek demografi, budaya dan politik. Adanya heterogenitas penduduk yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia telah menghasilkan keanekaragaman budaya, suku dan etnis. Di dalam keanekaragaman tersebut ternyata tidak menghasilkan potensi konflik yang tajam. Heterogenitas etnis lebih dominan menjadi sarana pemersatu di Kabupaten Bandung. Kerukunan antar etnis telah menjadikan masyarakat Kabupaten Bandung menjunjung tinggi nilai-nilai anti konflik. Kerukunan ini secara terbuka dapat terlihat pada kegiatan yang bernuansa politis seperti pemilihan Kepala Desa hingga Pemilu yang selalu penuh dengan nuansa nilai-nilai anti konflik. Walaupun terdapat gesekan kepentingan yang dapat memicu konflik, pada kenyataannya selalu dapat diredam dan diselesaikan. Selain itu, masyarakat Kabupaten Bandung memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dalam mendukung kegiatan pemerintah daerah. Kondisi inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk memilih Kabupaten Bandung sebagai lokasi penelitian.

Untuk mendukung penulisan disertasi, penulis melakukan wawancara dengan berbagai informan guna memperoleh data. Dari 31 kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung, penulis hanya mengambil sampel sebanyak tujuh kecamatan yaitu

Rahman Mulyana, 2012

Peningkatan CINC Governance Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Eksploratif di Kabupaten Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Kecamatan Margahayu, Pangalengan, Rancaekek, Banjaran, Ciwidey, Majalaya dan Cileunyi. Terdapat beberapa alasan penulis dalam menentukan wilayah kecamatan sebagai daerah penelitian, yaitu :

1. Kecamatan Pangalengan dan Kecamatan Ciwidey sebagai daerah yang pembangunannya kurang begitu maju (tertinggal) dimana daya beli masyarakatnya agak rendah sehubungan mayoritas pekerjaan masyarakat disana sebagai tenaga kontrak pemetik daun teh.
2. Kecamatan Margahayu dan Kecamatan Banjaran sebagai daerah yang berada di dekat pusat pemerintahan serta memiliki penduduk multi etnis (banyak pendatang). Selain itu merupakan daerah pusat industri yang masyarakatnya bervariasi memiliki daya beli cukup hingga daya beli tinggi.
3. Kecamatan Rancaekek dan Kecamatan Majalaya sebagai daerah yang pembangunan industri rumah tangganya banyak mengalami kegagalan (tutup usaha).
4. Kecamatan Cileunyi sebagai daerah yang sangat dekat dengan pusat lingkungan pendidikan (seperti IAIN, IKOPIN, UNWIM, UNPAD, dan STPDN serta sekolah-sekolah lanjutan kejuruan atau umum). Masyarakat di sana pada umumnya memiliki daya beli yang cukup.

Dari tujuh kecamatan ini, penulis mengambil sampel informan yang berasal dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Informan yang berasal dari unsur pemerintah ditentukan berdasarkan kriteria : kedudukan, tugas pokok, fungsi dan kewenangannya yang berada di lembaga Kesbangpol, Bappeda dan Kecamatan.

Rahman Mulyana, 2012

Peningkatan CINC Governance Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Eksploratif di Kabupaten Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Sedangkan informan dari masyarakat ditentukan berdasarkan kriteria : peranan, kedudukan dan ketokohnya dalam kemasyarakatan. Pemilihan mereka menjadi sampel informan, selain karena rekomendasi dari pimpinan Kecamatan juga dikarenakan dianggap memenuhi syarat kriteria yang telah ditentukan, yaitu memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mendalam tentang objek penelitian sehingga dianggap wajar untuk mewakili masyarakat secara keseluruhan.

Secara rinci, sampel informan untuk kegiatan penelitian ini berjumlah 46 orang yang terdiri atas dua orang dari Kantor Kesbanglinmas, dua orang dari Bappeda serta tujuh orang (satu orang unsur pimpinan Kecamatan yaitu Camat atau Sekwilmat) dan 35 orang tokoh masyarakat dari tujuh Kecamatan seperti yang telah dikemukakan di atas. Penulis melakukan penggalan data di tujuh kecamatan selama tujuh bulan terhitung bulan Mei 2011 hingga November 2011.

B. Desain Penelitian

Untuk meneliti penguatan *civic governance* melalui partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Desain ini dipilih dikarenakan melihat masalah yang cukup kompleks dan tujuan yang ingin dicapai adalah pemahaman mendalam dan komprehensif tentang penguatan *civic governance* melalui partisipasi masyarakat dalam kerangka otonomi daerah serta membangun model *civic governance*.

Dengan demikian, pelaksanaan penelitian yang menggunakan desain kualitatif dengan metode eksploratif bertujuan untuk menjelaskan sifat dan kondisi suatu subyek dalam keadaan apa adanya. Pemilihan dan penggunaan desain ini

Rahman Mulyana, 2012

Peningkatan CINC Governance Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Eksploratif di Kabupaten Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

terkait dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengeksplorasi penguatan *civic governance* dalam kerangka otonomi daerah, mengeksplorasi pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam memperkuat *civic governance*, mengeksplorasi peran pendidikan kewarganegaraan dalam pembangunan karakter bangsa guna memperkuat integrasi nasional serta mengeksplorasi serta mengembangkan model konseptual baru dari *civic governance* untuk diterapkan di Kabupaten Bandung.

Melalui desain penelitian ini, mengharuskan penulis melihat dan mendengar informan berbicara yang sebenarnya tentang keadaan dan dirinya sesuai dengan perspektif masing-masing serta mengamati perilaku informan seadanya terhadap lingkungan sesuai dengan posisi dan peran masing-masing. Sedangkan dengan metode kualitatif diupayakan untuk memperoleh kesimpulan yang mendalam tentang para pelaku (subjek) baik kata-katanya, tindakannya maupun suasananya. Berdasarkan desain penelitian tersebut kemudian dilakukan analisis dan pembahasan terhadap masalah penelitian.

Pemilihan desain kualitatif yang berdasarkan kepada Creswell (1998) ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku dari orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif yang berakar dari data dan teori, berkaitan dengan pendekatan tersebut sehingga diartikan sebagai aturan dan kaidah untuk menjelaskan proposisi atau perangkat proposisi yang dapat diformulasikan secara deskriptif ataupun secara proporsional.

Penggunaan desain kualitatif dilaksanakan sesuai dengan karakteristik yang ada, yaitu peneliti terlibat secara langsung di lokasi penelitian, mengamati dan berperan serta.

C. Metode Penelitian

Seperti halnya desain penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka metode penelitian disertasi ini juga menggunakan metode kualitatif yang pada hakikatnya mengamati orang-orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, hal ini disebabkan penelitian kualitatif termasuk dalam naturalistik inquiri, yang memerlukan manusia sebagai instrumen karena penelitiannya yang sarat oleh muatan naturalistik.

Metode penelitian kualitatif ini ditunjang dengan studi eksploratif. Berkaitan dengan studi eksploratif ini, terdapat beberapa akademisi seperti Usman dan Akbar (2008:3), Masyhuri dan Zainuddin (2008:48), serta Selltiz (1959) dalam Nazir (2003:88) yang mengemukakan bahwa studi eksploratif berusaha untuk menemukan permasalahan yang sedang atau diteliti oleh si peneliti sehubungan masalahnya belum pernah dijajagi dan belum pernah diteliti oleh orang lain.

Penggunaan metode kualitatif dengan studi eksploratif dalam penelitian disertasi ini disebabkan oleh beberapa alasan berikut. Pertama, masalah penelitian bertumpu pada proses pemaknaan atas konsep *civic governance* yang masih bersifat abstrak dan mencerminkan derajat kebenaran yang masih bersifat relatif atau sulit untuk diukur kebenarannya. Konsep *civic governance* yang jarang digunakan oleh para ilmuwan atau akademisi hanya mungkin dipahami makna dan artinya apabila

Rahman Mulyana, 2012

Peningkatan CINC Governance Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Eksploratif di Kabupaten Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

dikaji melalui interaksi antara peneliti dengan informan dan fenomena *civic governance* yang menjadi setting pengamatan.

Kedua, penelitian ini bermaksud menganalisis pola-pola pemahaman dan pemaknaan terhadap konsep *civic governance* serta implementasinya sebagai usaha untuk mencari jawaban faktual atas pertanyaan “bagaimana” (*how*) penguatan *civic governance* melalui partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pemerintahan. Mengapa masyarakat memiliki kemauan berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pemerintahan padahal terdapat konsekuensi akan “dimarginalkan” oleh aparat pemerintah atau membuang biaya, waktu dan tenaga secara sia-sia karena belum tentu kegiatan yang menjadi bentuk partisipasinya tersebut akan diikuti atau diterima oleh pemerintah. Bagaimana pula mereka memahami kebijakan-kebijakan pemerintah yang layak untuk dikritisi atau kurang populis bagi kepentingan umum.

Ketiga, pemahaman, pemaknaan dan implementasi penguatan *civic governance* menuntut teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan terlibat (*participant observation*). Tuntutan ini mencuat dari karakter masalah yang dapat menimbulkan pandangan yang berbeda antara peneliti dengan informan.

D. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji beberapa aspek yang menjadi fokus penelitian. Setelah melakukan penelitian di lapangan, penulis dapat merumuskan beberapa definisi operasional dari aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian.

Rahman Mulyana, 2012

Peningkatan CINC Governance Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Eksploratif di Kabupaten Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Adapun beberapa definisi operasional yang dapat dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. *Civic Governance* merupakan gerakan (*movement*) pembangunan partisipatif yang mendayagunakan potensi warganegara/masyarakat untuk mengembangkan/menumbuhkan pemecahan-pemecahan masalah secara kreatif dalam pengelolaan pembangunan dan pemerintahan guna mencari keserasian antara pendekatan pengelolaan dari Pusat dan tuntutan masyarakat.
2. Otonomi Daerah merupakan bentuk pemerintahan sendiri (*self government*) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki hak untuk memerintah atau menentukan nasib sendiri (*the right of self government, self determination*) oleh sebuah daerah.
3. Integrasi Nasional merupakan konsepsi bangsa dan sikap mental bangsa untuk memadukan diri ke dalam kerangka kehidupan nasional yang luas dan menyeluruh serta bertujuan untuk menciptakan kehidupan bangsa dan negara secara utuh dan terpadu.
4. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan tatanan konseptual yang menggambarkan keseluruhan upaya sistematis dan sistemik untuk mengembangkan cita-cita, nilai, prinsip, dan pola perilaku demokrasi dalam diri individu warganegara pada tatanan iklim yang demokratis, sehingga pada gilirannya kelak secara bersama-sama dapat memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya warga negara madani yang demokratis.

5. Pembangunan Karakter Bangsa merupakan proses peningkatan kualitas kepribadian dan gaya hidup pada penduduk negara tertentu yang mengandung unsur *moral knowing*, *moral feeling* dan *moral action*.
6. Partisipasi Masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan mengenai apa yang akan dilakukan dan dengan cara bagaimana keterlibatan mereka dalam pengimplementasian program-program dan keputusan-keputusan dengan menyumbangkan berbagai sumber atau bekerja sama dalam kegiatan-kegiatan khusus untuk kepentingan program pembangunan; dan atau keterlibatan mereka dalam usaha-usaha untuk mengevaluasi program-program pemerintahan dalam pembangunan berbagai aspek kehidupan.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam kegiatan penulisan disertasi ini adalah kuesioner dan peneliti sendiri. Kuesioner menjadi instrumen penting mengingat dalam analisa dan pembahasan di Bab IV disertasi ini sangat menonjolkan hasil pendapat responden yang dituangkan dalam kuesioner. Selain itu peneliti memiliki multi fungsi sebagai alat, langsung melakukan pengamatan, wawancara di lapangan, melibatkan diri dalam aktivitas bersama warga negara setempat dengan tujuan ikut melihat dan merasakan langsung keadaannya sehingga data dan informasi yang diperoleh menjadi obyektif dan valid. Dengan demikian semua informasi yang diperoleh dari hasil wawancara (melalui pedoman wawancara), pengamatan di lapangan serta dokumen-dokumen penting lainnya, seluruhnya hanya bersumber dari skenario yang disusun oleh peneliti

sendiri. Instrumen pendukung penelitian yang digunakan selain pedoman wawancara

Rahman Mulyana, 2012
Peningkatan CINC Governance Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Eksploratif di Kabupaten Bandung)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

adalah rancangan model *civic governance*. Pedoman wawancara dan rancangan model *civic governance* terlampir pada lampiran disertasi ini.

F. Proses Pengembangan Instrumen

Guna lebih optimal dalam memperoleh data di lapangan, maka dalam proses pengembangan instrumen dilakukan upaya penemuan model *civic governance* melalui rancangan model dalam bentuk kuesioner. Penemuan model *civic governance* ini, bertujuan : (1) Bagi pemerintah daerah Kabupaten Bandung, model *civic governance* akan memberikan informasi yang lebih akurat tentang kapasitas yang dimilikinya. Sehingga berbagai kebijakan dan program peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dapat dirancang lebih rasional sesuai dengan kebutuhan yang ada, (2) Hasil penilaian akan menjadi informasi bagi pemerintah Kabupaten Bandung dalam menilai daya saing dan keunggulan daerah. Informasi akan melandasi daerah dalam membangun pola jejaring dan kerjasama antar daerah yang sinergis, (3) Hasil model akan menjadi salah satu bentuk dari pertanggung jawaban (akuntabilitas) pemerintah Kabupaten Bandung terhadap *stakeholders* di daerahnya, (4) Hasil model dapat menjadi informasi bagi pihak swasta dalam membangun kerjasama di daerah Kabupaten Bandung, dan (5) Hasil model sekaligus juga akan menjadi salah satu indikasi makro keberhasilan pembangunan yang dapat di komparasi dengan daerah lainnya.

Mengingat begitu banyak pihak yang akan menjadikan informasi tentang penyelenggaraan *civic governance* sebagai informasi awal dalam mengambil satu keputusan yang berhubungan dengan Kabupaten Bandung, maka penilaian

Rahman Mulyana, 2012

Peningkatan CINC Governance Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Eksploratif di Kabupaten Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

pelaksanaan *civic governance* di Kabupaten Bandung menjadi suatu hal yang harus dilakukan. Apalagi sampai dengan saat ini, instrumen dan model penilaian yang terstandarisasi belum terbangun. Rumusan model yang diajukan dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan dalam membangun model yang nantinya akan distandarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bandung.

Pengembangan model konseptual baru dari *civic governance* yang peneliti ajukan mengadopsi langkah-langkah yang dilakukan oleh Borg & Gall (1989). Model yang digunakan memang memiliki kelemahan sehubungan nilai yang diperoleh lebih bersifat subjektif. Namun demikian pengembangan model konseptual baru dari pelaksanaan *civic governance* di Kabupaten Bandung diupayakan akan mampu memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan secara optimal jika aspek-aspek yang berkaitan dengan penilaian tersebut mampu memberikan dukungan yang optimal juga. Kelemahan dalam salah satu aspek dimungkinkan akan memberi kontribusi untuk terjadinya bias dari kondisi yang sebenarnya di lapangan. Untuk itu aspek-aspek yang dipandang memiliki kontribusi cukup penting dalam penjaminan kualitas hasil penilaian perlu diperhatikan dan dirumuskan secara cermat.

Sebagai suatu model, peneliti berpendapat bahwa terdapat beberapa aspek yang harus dirancang dan dirumuskan secara cermat sehingga nantinya mampu memberikan jaminan atas kualitas model itu sendiri. Adapun aspek tersebut adalah :

1. Aspek Kerangka Hukum
2. Aspek Perencanaan Model
 - a. Penetapan Alat/Instrumen Model

Rahman Mulyana, 2012

Peningkatan CINC Governance Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Eksploratif di Kabupaten Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

- b. Pengembangan standar / kriteria Model
 - c. Pengembangan instrumen pengendalian dan tindak lanjut Model
3. Aspek Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Model
- a. Tahapan persiapan
 - b. Pelaksanaan
 - c. Evaluasi dan Pelaporan

Aspek kerangka hukum merupakan kerangka dasar untuk memberikan landasan atas pelaksanaan prinsip *civic governance* di Kabupaten Bandung. Sampai dengan saat ini kerangka ini belum secara tegas mengatur hal tersebut. Untuk itu dibutuhkan kerangka hukum yang memberikan kekuatan hukum atas pelaksanaannya di Kabupaten Bandung.

Aspek perencanaan model merupakan aspek yang berkaitan dengan perancangan model itu sendiri. Ada tiga komponen yang perlu diperhatikan dan disusun secara cermat dengan aspek ini, yaitu instrumen model itu sendiri, standar atau kriteria dari model dan instrumen pengendalian serta tindak lanjut atas hasil model yang terbangun.

Sedangkan aspek yang ketiga adalah penyusunan pedoman pelaksanaan penilaian. Pedoman ini dibutuhkan untuk membantu pelaksana menilai pelaksanaan *civic governance* di Kabupaten Bandung.

1. Aspek Penetapan Kerangka Hukum

Model pelaksanaan *civic governance* di Kabupaten Bandung akan memiliki makna yang sangat strategis bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten

Rahman Mulyana, 2012

Peningkatan CINC Governance Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Eksploratif di Kabupaten Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Bandung. Untuk itu, dalam pelaksanaannya harus dilandaskan pada kerangka hukum yang jelas pula. Penetapan kerangka hukum ini mengacu kepada produk hukum di tingkat Nasional dan Daerah.

Dasar hukum yang dapat dijadikan rujukan diantaranya adalah TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, kemudian UU Nomor 22 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara.

Selain ketiga dasar hukum tersebut di atas, peneliti pun menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung. Namun dari semua dasar hukum yang ada belum secara jelas mengharuskan adanya standar/kriteria pelaksanaan prinsip *civic governance* tersebut.

Kepentingan akan adanya kerangka hukum di tingkat daerah ini adalah untuk memberikan tekanan atau penguatan agar standarisasi pelaksanaan *civic governance* di Kabupaten Bandung dapat dilakukan secara periodik. Dengan dasar hukum inilah diharapkan pelaksanaan *civic governance* tidak lagi bersifat *voluntary* yang bersifat sukarela (dapat dilaksanakan atau tidak dilaksanakan) akan tetapi sebaliknya bersifat memaksa dan harus diselenggarakan.

2. Aspek Perancangan Sistem Model

Pelaksanaan *civic governance* di Kabupaten Bandung dapat menghasilkan suatu hasil yang optimal jika ditunjang oleh sejumlah komponen yang saling berkaitan dan memiliki keterhubungan yang sinergis diantara sub-komponennya. Komponen yang dapat menunjang suatu sistem model adalah : (a) *instrumen atau alat untuk penilaian*, yaitu alat yang berfungsi untuk mengamati, memantau, mengukur atau menguraikan sekaligus melaporkan segala sesuatu yang terjadi dalam pelaksanaan prinsip *civic governance* di Kabupaten Bandung, (b) *standar sebagai kriteria untuk evaluasi atas hasil penilaian*, yaitu instrumen atau alat penilai yang berfungsi sebagai pengevaluasi pelaksanaan konsep *civic governance* yang telah dinilai oleh instrumen penilaian. Hasil penilaian ini selanjutnya akan menjadi masukan kealat pengubah jika dalam prosesnya menemukan penyimpangan dengan standar yang telah ditetapkan, (c) *instrumen pengendalian dan tindak lanjut*, yaitu instrumen pengubah yang berfungsi sebagai pengubah perilaku. Pengubah ini akan menerima masukan dari hasil evaluasi yang selanjutnya akan memberikan penguatan atas hasil yang baik dan/atau perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi.

a. *Penetapan Alat / Instrumen Penilaian*

Alat penilaian merupakan penjabaran dari indikator-indikator yang akan dinilai. Indikator yang akan dinilai dalam model awal penilaian ini meliputi 11 dimensi atau prinsip berdasarkan teori B.C. Smith (2009) yang dinilai melalui 55 pernyataan sebagai indikator. Untuk mengoperasionalkan indikator-indikator tersebut

ke dalam, maka dalam model ini disusun instrumen penilaian berupa Kuesioner pelaksanaan *civic governance* di Kabupaten Bandung.

Kuesioner pelaksanaan *civic governance* di Kabupaten Bandung terdiri dari sejumlah pernyataan-pernyataan dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 9. Pemilihan skala ini dengan asumsi bahwa penilaian dengan rentang skala akan diperoleh variasi penilaian yang dapat menggambarkan perbedaan persepsi responden. Adapun angka 1 menunjukkan penilaian terendah sedangkan angka 9 menunjukkan penilaian tertinggi. Skala penilaian ini diinterpretasikan peneliti sebagai berikut :

- Skala 1 : pelaksanaan *civic governance* dalam dimensi prinsip dan indikator sangat tidak memadai
- Skala 9 : pelaksanaan *civic governance* dalam dimensi prinsip dan indikator sangat memadai

Adapun bentuk rancangan model awal untuk melakukan penilaian pelaksanaan *civic governance* di Kabupaten Bandung adalah sebagaimana terlampir pada lampiran.

b. Pengembangan Standar Penilaian

Standar penilaian ditetapkan dengan mengacu kepada kualitas ideal pelaksanaan *civic governance* di Kabupaten Bandung. Penetapan standar ini merujuk kepada harapan masyarakat tentang pelaksanaan prinsip *civic governance*.

Kepentingan utama penetapan standar atau kriteria dalam penilaian pelaksanaan prinsip *civic governance* adalah sebagai alat evaluasi capaian kualitas yang dihasilkan

Rahman Mulyana, 2012

Peningkatan CINC Governance Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Eksploratif di Kabupaten Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

dengan yang direncanakan. Dikarenakan yang dijadikan dasar penilaian adalah persepsi, maka evaluasi penilaian pelaksanaan prinsip *civic governance* akan memperbandingkan capaian kualitas yang dipersepsikan dengan capaian kualitas yang diharapkan.

Tujuan utama dari proses penetapan standar adalah memberikan dasar yang pasti dalam menetapkan suatu nilai atas hasil penilaian. Standar merupakan criteria yang dibentuk untuk menetapkan apakah hasil penilaian tersebut termasuk kategori sudah memadai atau sebaliknya. Penetapan standar merujuk pada standar nilai yang sudah dibakukan.

Seperti yang telah diungkapkan, bahwa untuk menilai capaian *civic governance* digunakan skala penilaian dari skala sangat tidak memadai sampai dengan sangat memadai (skor 1 sampai 9). Selanjutnya, nilai capaian tersebut akan dihitung nilai rata-rata tertimbang. Nilai skor rata-rata tertimbang yang dihasilkan tersebut akan menjadi indeks persepsi pelaksanaan *civic governance* di Kabupaten Bandung.

Penetapan indeks *civic governance* memiliki makna penting, yang pertama dapat dengan mudah menunjukkan nilai kualitatif dalam penilaian yang dilakukan melalui persepsi tadi kedalam nilai kuantitatif (angka). Kedua, nilai angka ini untuk memberikan informasi yang relatif memiliki nilai standar sehingga nilai tersebut memiliki nilai komparasi baik dalam rentang waktu tertentu maupun secara antar nilai indeks *civic governance* pada tahun yang sama.

c. Pengembangan Instrumen Pengendalian dan Tindak Lanjut Penilaian

Instrumen pengendalian dan tindak lanjut penilaian merupakan instrumen yang harus dibangun dalam model penilaian pelaksanaan prinsip *civic governance* di Kabupaten Bandung. Kepentingan utama dari keberadaan instrumen ini adalah untuk memberikan penguatan sekaligus jika diperlukan sebagai pengubah perilaku pelaksanaan prinsip *civic governance*. Instrumen pengendalian menjadi penguat manakala perilaku pelaksanaan prinsip *civic governance* di Kabupaten Bandung sudah baik. Sudah menjadi keharusan nilai pencapaian yang sudah optimal (memadai) harus mendapatkan penghargaan. Sementara itu sebaliknya, jika hasilnya belum optimal (belum memadai) maka merupakan kepastian juga untuk mendapatkan teguran. Melalui instrumen yang dikembangkan, diharapkan hasil penilaian pelaksanaan prinsip *civic governance* di Kabupaten Bandung memiliki koneksi dengan upaya untuk melakukan penguatan.

3. Aspek Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penilaian

Langkah selanjutnya setelah perancangan sistem penilaian adalah penyusunan pedoman penilaian. Pedoman penilaian ini maksudnya adalah hal-hal apa saja yang perlu dilakukan apabila system penilaian tersebut akan diterapkan di lapangan. Penyusunan pedoman penilaian ini maksudnya untuk memandu di dalam mengimplementasikan model penilaian ini. Oleh karena itu, pedoman penilaian akan memuat langkah-langkah yang perlu dilakukan di dalam penilaian pelaksanaan *civic governance* di Kabupaten Bandung. Pedoman pengukuran secara umum memuat tiga

langkah yang harus dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

Rahman Mulyana, 2012

Peningkatan CINC Governance Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Eksploratif di Kabupaten Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

a. Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut : (a) identifikasi Kecamatan yang akan dijadikan objek penilaian, (b) penyiapan bahan yaitu Kuesioner pelaksanaan *civic governance* di Kabupaten Bandung, (c) penetapan responden atas rekomendasi aparat Kecamatan dimana setiap Kecamatan diwakili oleh 5 (lima) orang tokoh masyarakat dengan asumsi memenuhi persyaratan yang telah ditentukan peneliti.

b. Tahap Pelaksanaan Penilaian

Dalam tahap pelaksanaan penilaian, langkah-langkah yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) *Pengumpulan Data*. Dalam tahap pengumpulan data ditentukan strategi pendistribusian dan pengembalian instrumen kuesioner.
- 2) *Pengisian kuesioner*. Pengisian instrumen kuesioner dilakukan dengan dipandu oleh peneliti.
- 3) *Pengolahan data*. Dalam tahapan ini dilakukan pengolahan terhadap instrumen atau kuesioner yang telah diisi oleh para responden.

c. Tahap Evaluasi dan Laporan

Tahapan terakhir dalam penilaian pelaksanaan *civic governance* di Kabupaten Bandung adalah tahapan evaluasi dan pelaporan. Dalam tahapan evaluasi, peneliti melakukan evaluasi terhadap keseluruhan tahapan pelaksanaan penilaian mulai dari persiapan sampai dengan tahap penyusunan laporan itu sendiri.

G. Teknik Pengumpulan Data

Keseluruhan data yang dihimpun dalam disertasi ini berasal dari sumber primer (*main source of data*) dan sumber sekunder (*supportive data or information*). Data primer berupa kata-kata, tuturan serta tindakan atau perilaku informan, serta data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen, arsip, jurnal, karya ilmiah, data statistik dan lain-lain.

1. Data Primer

Data primer utama penelitian disertasi ini melalui wawancara terhadap 46 orang yang terdiri atas dua orang dari Kantor Kesbanglinmas, dua orang dari Bappeda serta tujuh orang (satu orang unsur pimpinan Kecamatan yaitu Camat atau Sekwilmat) dan 35 orang tokoh masyarakat dari tujuh Kecamatan yang telah dikemukakan di atas.

a. Informan Penelitian

Kegiatan wawancara telah dilakukan terhadap 11 orang informan kunci dan beberapa kelompok informan yang digali melalui pengisian kuesioner. Berdasarkan jenis informan dan informasi yang didapatkan, peneliti mengelompokkan dalam beberapa kategori sebagai berikut :

- 1) Aparat Kesbangpollinmas. Dari mereka digali perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan karakter bangsa yang dapat memperkokoh integrasi nasional dalam kerangka otonomi daerah. Selain itu kepada mereka digali pula pemahaman mereka terhadap konsep *civic governance*.
- 2) Aparat Bappeda. Dari mereka digali perumusan visi, misi, strategi pembangunan

Rahman Mulyana, 2012

Peningkatan CINC Governance Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Eksploratif di Kabupaten Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

dan program kerja pemerintah daerah Kabupaten Bandung serta pemahaman terhadap konsep *civic governance*.

- 3) Aparat Kecamatan. Dari mereka digali pelaksanaan kebijakan dan kegiatan yang bernuansa penguatan *civic governance* serta bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.
- 4) Tokoh Masyarakat. Informasi yang digali dari kelompok ini berkaitan dengan hasil pembangunan dan bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Bandung.

b. Objek dan Peristiwa yang Diamati

Selain digali melalui wawancara mendalam, data primer dalam disertasi ini dihimpun melalui pengamatan terlibat terhadap sejumlah kegiatan (objek dan peristiwa). Pengamatan dilakukan terhadap kegiatan Diseminasi Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat (3 Juni 2011 di Kantor Bappeda), Sosialisasi Undang-undang Politik dan Hak Asasi Manusia (6-7 Juli 2011 di Kantor Kesbangpollinmas), serta Pembinaan dan Peningkatan Kesadaran Politik bagi Masyarakat (21-24 September 2011 di Kantor Kesbangpollinmas) serta kegiatan Munjung dan Bongkar Bumi dalam rangka menyambut musim taman dan musim penghujan agar masyarakat selalu menjaga harmoni alam (6 Oktober 2011) di Desa Cikondang Kecamatan Pangalengan.

Pengamatan difokuskan kepada latar, pelaku, peristiwa dan proses kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Latar, yaitu properti yang digunakan oleh Badan Kesbangpollinmas, Bappeda
- Rahman Mulyana, 2012**
Peningkatan CINC Governance Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Eksploratif di Kabupaten Bandung)
 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

dan Kecamatan seperti tempat kegiatan (gedung), bendera, slogan dan lambang pemerintah daerah.

- 2) Pelaku, yaitu para pelaku (aparatur dan masyarakat) yang terlibat dalam peristiwa yang diikuti oleh peneliti. Wawancara dan diskusi dengan para pelaku bertujuan menggali makna kegiatan yang dilaksanakan.
- 3) Peristiwa, yaitu dengan menyaksikan, mencatat dan memaknai berbagai kejadian dalam kegiatan seperti yang telah dikemukakan di atas yang bernuansa penguatan *civic governance*. Kegiatan ini menjadi peristiwa penting yang bukan hanya memberi informasi, tetapi juga menajamkan fokus penelitian.
- 4) Proses, yaitu kegiatan pengumpulan data melalui pengamatan terhadap proses kejadian dalam setiap kegiatan. Pengamatan ini berperan terhadap informan dan berbagai peristiwa untuk ditarik inferensi yang berkaitan dengan makna berdasarkan sudut pandang informan. Melalui pengamatan pula peneliti menemukan pemahaman mereka atas suatu fenomena namun tidak mereka ucapkan. Peneliti dapat menyaksikan langsung sikap keseriusan, banyolan, kekesalan bahkan kemarahan mereka dalam setiap kegiatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder dihimpun dari informasi kepustakaan, baik dari buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, laporan dan dokumen. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengungkap fakta yang mampu menjelaskan makna kejadian yang lampau namun masih memiliki relevansi dan pertautan dengan gejala yang diamati.

Berbagai buku, hasil penelitian dan dokumen diperlakukan sebagai sumber

Rahman Mulyana, 2012
Peningkatan CINC Governance Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Eksploratif di Kabupaten Bandung)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

kepuustakaan yang penting.

Untuk memberikan gambaran yang detail tentang konteks peristiwa, hasil studi kepuustakaan dieksplorasi dan divalidasi lebih jauh dengan mewawancarai responden. Selain untuk menjaga akurasi data, validasi dilakukan untuk menggali makna peristiwa menurut responden itu sendiri.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan terlibat, dan studi kepuustakaan. Wawancara dilakukan bukan saja untuk menggali informasi yang didapat melalui pengamatan dan studi kepuustakaan, tetapi juga untuk mengungkap makna yang tidak dapat melalui kedua teknik ini. Melalui wawancara peneliti mengembangkan empati. Hanya melalui wawancara dengan responden, peneliti dapat lebih memahami proses pemaknaan atas sebuah peristiwa atau wacana menurut sudut pandang responden.

Penerapan tradisi kualitatif dalam penelitian ini berpegang teguh kepada batasan-batasan yang diberikan oleh Cresswell (1994: 136) yang mengemukakan enam asumsi dalam penelitian kualitatif, yaitu (a) Peneliti kualitatif lebih menekankan perhatian pada proses, bukannya hasil atau produk, (b) Peneliti kualitatif tertarik pada makna - bagaimana orang membuat hidup, pengalaman dan struktur dunianya masuk akal, (c) Peneliti kualitatif merupakan instrumen pokok untuk pengumpulan dan analisa data. Data didekati melalui instrumen manusia, bukannya melalui inventaris, daftar pertanyaan atau mesin, (d) Peneliti kualitatif melibatkan

kerja lapangan. Peneliti secara fisik berhubungan dengan orang, latar belakang, lokasi

Rahman Mulyana, 2012

Peningkatan CINC Governance Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Eksploratif di Kabupaten Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

atau institusi untuk mengamati atau mencatat perilaku dalam latar alamiahnya, (e) Peneliti kualitatif bersifat deskriptif dalam arti peneliti tertarik pada proses, makna dan pemahaman yang didapat melalui kata atau gambar, dan (f) Proses penelitian kualitatif bersifat induktif dimana peneliti membangun abstraksi, konsep, hipotesa dan teori;

H. Analisis Data

Penafsiran data dilakukan dengan menggunakan kategori yang telah ditetapkan. Data yang telah dikumpulkan dihubungkan dan diuji dengan kategori yang telah disiapkan. Selanjutnya, dapat ditafsirkan dengan menghubungkannya dengan konsep dan teori yang ada. Mengacu pada pendapat tersebut, maka dalam penelitian ini data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan diinterpretasikan secara kualitatif dengan maksud menjawab masalah penelitian. Data tersebut ditafsirkan menjadi kategori-kategori yang positif dan berarti menjadi bagian dari teori atau mendukung teori yang diformulasikan secara deskriptif.

Mengacu kepada uraian di atas, analisis data secara operasional dilakukan dengan menempuh langkah-langkah berikut :

1. Reduksi data, yakni memilih dan memilah data yang penting dan dibutuhkan sesuai dengan fokus penelitian, kemudian menyajikannya ke dalam bentuk uraian yang komprehensif. Penelitian semula bermaksud mengevaluasi kegiatan pembangunan karakter bangsa serta pengaruhnya terhadap kondisi stabilitas wilayah dalam kerangka otonomi daerah. Namun, setelah mengamati dan

berdiskusi dengan aparat pemerintah, maka fokus penelitian menjadi kepada

Rahman Mulyana, 2012

Peningkatan CINC Governance Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Eksploratif di Kabupaten Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

penguatan konsep *civic governance* dalam kerangka otonomi daerah untuk memperkuat integrasi nasional. Selain itu, penelitian ini mengkaji keterkaitan konsep *civic governance* dengan pembangunan karakter bangsa dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

2. Display data, yakni penyajian data melalui model sehingga keseluruhan data dapat digambarkan dengan jelas. Model dibuat untuk menemukan pola penguatan *civic governance* dalam kerangka otonomi daerah dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Kesimpulan dan verifikasi, yakni penyajian informasi secara sistematis dan logis kemudian disimpulkan sehingga diperoleh makna yang sesungguhnya. Karena kesimpulan pada tahap ini masih tentatif, maka perlu diuji lanjut oleh data yang akan dihimpun kemudian yang bersifat menguji kesimpulan sementara. Dalam disertasi ini kesimpulan berasal dari pola-pola yang mencuat di lapangan dan saat analisis. Setelah terkukuhkan dengan fakta baru ditarik sebagai kesimpulan final.

I. Jadwal Penelitian

Peneliti menyadari bahwa kegiatan penulisan Disertasi membutuhkan perencanaan yang sangat matang. Berkaitan dengan hal tersebut, maka peneliti melaksanakan proses penelitian yang terbagi menjadi empat tahap, yaitu tahap orientasi, tahap eksplorasi dan tahap uji validitas data. Tahap-tahap, waktu dan lokasi pengumpulan data secara rinci adalah berikut :

1. Tahap Orientasi, yaitu menghimpun data secara umum yang dilakukan melalui

studi dokumentasi, observasi dan wawancara secara umum dan terbuka. Selain

Rahman Mulyana, 2012

Peningkatan CINC Governance Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Eksploratif di Kabupaten Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

mempelajari dokumen di Kantor Kesbangpol Linmas dan Bappeda Kabupaten Bandung, peneliti pun melakukan wawancara pendahuluan dengan para informan yang dilaksanakan pada bulan Maret sampai Mei 2011.

2. Tahap Eksplorasi, yaitu mendalami temuan yang terkait dengan penguatan *civic governance* dalam memperkuat integrasi nasional. Wawancara yang lebih terfokus ini dilaksanakan pada bulan Juni 2011. Selain itu, pada tahapan ini dilaksanakan pula kegiatan eksplorasi penemuan model melalui instrumen kuesioner. Penggunaan kuesioner yang disebarakan kepada informan dimaksudkan untuk mendapatkan respons masyarakat tentang bentuk *civic governance* yang ideal untuk diterapkan di Kabupaten Bandung. Adapun tahapan kegiatan tersebut dapat dilihat pada rincian sebagai berikut.

Tabel 3.1.

Tahapan Penemuan Model dan Observasi Lapangan

NO	TAHAPAN	WILAYAH PENELITIAN	KETERANGAN (ISI KUESIONER)
1	Rancangan Model	3 Kecamatan	
2	Eksplorasi Terbatas	Kec. Margahayu	55 item pernyataan
3	Eksplorasi Terbuka	Kec. Pangalengan Kec. Rancaekek	55 item pernyataan
4	Model Sementara (Hasil Revisi)	4 Kecamatan	
5	Eksplorasi Awal	Kec. Banjaran Kec. Ciwidey	44 item pernyataan
6	Eksplorasi Akhir	Kec. Cileunyi Kec. Majalaya	33 item pernyataan
7	Model Final/Teruji		22 item pernyataan

3. Tahap Uji Validitas Data melalui *cross check* informasi dan konfirmasi ulang terhadap data yang diperoleh sehingga dilakukan penulisan laporan sebagai tahap akhir, dilakukan pada bulan Juni sampai November 2011.

-0-

